



SOCIAL INEQUALITIES: PROBLEMATIKA STRATEGI PENGEMBANGAN DAKWAH DALAM PERSPEKTIF TEORI SOSIAL KONFLIK

Sulkhan Chakim¹⁾

¹⁾ Penulis adalah Sa'jana Agama (S.Ag.), Magister Manajemen (M.M.), kini sedang studi S-3 di Kajian Budaya dan Media UGM.

Abstract: *Social inequalities is the factored identities in social life, can be explained from the perspective of social-conflict theory as an inequality in resource access control in social life, which is caused by various sources, namely the existence of social class, gender, religion, geographical location, race/ethnicity and others. Various sources of social inequality should be used as a base framework for the development strategy by activists proselytizing mission, so the goal can be achieved embodiment Khaira Ummah. In this study, the formulation of development strategy of the Islamic dawah refers amar matuf nahi munkar in the formulation of social reengineering.* **Keywords:** Social Inequalities, Amar Matuf Nahi Munkar, and Khaira Ummah.

PENDAHULUAN

Dakwah dalam lingkup aktivitas merupakan ekspresi setiap individu muslim yang selalu berkaitan dengan lingkungannya. Jika merujuk dakwah dalam pengertian pada keseluruhan pelaksanaan ajaran Islam oleh perseorangan atau kelompok dalam kehidupan sosial kemasyarakatan,¹ maka aktivis dakwah dalam mendesain kegiatan dakwah berangkat pada persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan realitas masyarakat. Dalam konteks ini, yang perlu dipahami adalah ajaran Islam sebagai materi dakwah masih pada tataran nilai atau belum aplikatif. Hal ini yang menjadi tantangan para aktivis dakwah untuk menerjemahkannya sehingga ajaran Islam mampu membumi dan dapat mengubah dan mendinamisasikan kehidupan menuju *khaira ummah*.

Kehidupan *khaira ummah* dan nilai al-Qur'an dapat diwujudkan oleh para aktivis, tentunya dibutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang analisis persoalan kehidupan sosial. Dalam kajian ini, ada tiga persoalan yang harus dikaji, yaitu mengkaji tentang pengertian *social inequality*, bagaimana *social inequality* dalam pendekatan teori sosial konflik, dan mencoba merumuskan strategi pengembangan dakwahnya.

PENGERTIAN SOCIAL INEQUALITIES

Kata *inequality* berasal dari bahasa Inggris yang berarti *lack of equality* atau *unfairness*,² yang berarti kurangnya akan kesamaan, atau kesenjangan dan ketidakadilan. Secara sosiologis, *inequality* adalah situasi kehidupan sosial yang ditandai dengan adanya kesenjangan karena faktor-faktor perbedaan kelamin, usia, mentalitas, stratifikasi, dan seterusnya. Menurut Bradley bahwa *social inequality* terjadi karena proses diferensiasi sosial, seperti adanya *class*, ras, gender, etnisitas, umur, *disability*, dan lain-lain. Karena konsep *material inequality* dipahami dengan istilah *fractured identity*, yang berarti identitas yang retak. Menurutnnya ada empat sumber, adalah:

Internal fragmentation that occurs within particular classed groupings, for example, the divisions within the working class, External fragmentation that arise because of the impacts of variables such as race and gender. The impact of social change, for example, young women are able to take advantage of career opportunities that are not available to older women. Increasing individualism as people are more socially and geographically mobile?



Dengan demikian, sosial *inequalities* adalah situasi dan kondisi kehidupan sosial yang disebabkan oleh kesenjangan atau ketimpangan dari faktor-faktor jenis kelamin, usia, kelas sosial (status ekonomi sosial), gender, ras/etnis, kemampuan individu, perbedaan geografis, dan bahkan agama.

SUMBER-SUMBER KETIMPANGAN SOSIAL

Kajian tentang sumber-sumber ketimpangan atau ketidakseimbangan sosial ini diperlukan pendekatan konstruksi sosial untuk mengetahui dan menginterpretasikan realitas sebagai sesuatu yang dibentuk secara sosial melalui aktivitas sosial. Dalam hal ini, konstruksi sosial dapat digunakan untuk menjelaskan kecenderungan dalam melihat berbagai bentuk ketimpangan masyarakat. Realitas dapat dilihat secara fakta objektif dan makna subjektif. Sebagaimana pendapat Weber dan Durkheim,

“By ‘reality construction’ they mean the process whereby people continuously create through their actions and interactions, a shared reality that is experienced as objectively factual and subjectively meaningful. They assume that every day reality is a socially constructed system in which people bestow certain order on everyday phenomena, a reality which has both subjective and objective elements. By subjective they mean that reality is personally meaningful to the individual. By objective they are referring to the social order, or the institutional world, which they view as human product”⁴

Berangkat dari konstruksi sosial ini, maka sumber-sumber ketimpangan dapat dikaji lebih lanjut, sebagai berikut:

Kelas Sosial

Kelas sosial terlahir dari suatu cara produksi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas sarana produksi, yang kemudian melahirkan berbagai kepentingan kelas borjuis untuk menguasai sarana produksi, dan kelas buruh atau proletar yang menjual tenaga dalam proses produksi untuk bertahan hidup. Dalam pandangan masyarakat kapitalis, pekerja adalah agen yang bebas dan penjualan tenaga mereka adalah suatu kontrak adil dan bebas. Kapitalisme memiliki tujuan untuk mengeksploitasi tenaga kerja dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari hasil produksi yang dijual di pasar. Dalam hal ini, pasar dan produksi digunakan untuk memperoleh nilai surplus yang mengandung nilai guna maupun nilai tukar sebagai komoditas. Secara faktual, dalam relasi sosial, bahwa lingkungan produksi, kedudukan pekerja teralienasi dengan produk kerja karena para pekerja/proletar teralienasi dari dunia kerja, yang merupakan aktivitas sosial. Mereka teralienasi dari diri mereka sendiri.

Perbedaan kepentingan dan kedudukan dalam proses produksi dan relasi sosialnya akan melahirkan ketimpangan yang bersumber dari persoalan kekuasaan sumber ekonomi atau dapat disebut juga ketimpangan politik bagi kelas yang termarginal dari lingkungan sosialnya. Bagi Marx dan Weber⁶ ketimpangan terjadi karena berkaitan dengan berbagai akses sumber ekonomi (*central resources*) yang dikuasai oleh kelas yang berkuasa (*people have*) atas kelas buruh (*people do with what they have*). Hubungannya adalah bentuk kepentingan yang melahirkan konflik kelas dalam produksi, dan bukan di pasar.

Ketimpangan Gender

Gender diartikan sebagai konstruksi sosiokultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminin. Gender berbeda dengan seks atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis.⁷ Meskipun jenis kelamin laki-laki sering berkaitan erat dengan gender maskulin dan jenis kelamin perempuan berhubungan dengan gender feminin, kaitan jenis kelamin dan gender bukanlah merupakan korelasi absolut.⁸ Dalam konteks sosiokultural, pemaknaan feminin dan maskulin sangat dimungkinkan ada perbedaan antara daerah satu dengan lainnya. Realitas sosial menunjukkan bahwa pembagian peran berdasarkan gender melahirkan keadaan yang tidak seimbang saat perempuan teropresi atau subordinasi oleh laki-laki. Hal ini yang disebut dengan *gender inequality*. Keidakadilan gender merupakan sistem dan struktur.

Ketimpangan (*inequality*) gender sebagai kondisi ketika perempuan secara universal di bawah laki-laki, di mana laki-laki menjadi dominan karena partisipasi dalam kehidupan publik dan merendahkan perempuan ke lingkup domestik. Partisipasi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan publik tidak hanya memberikan kenaikan otoritas laki-laki atas perempuan secara universal, namun juga penilaian yang lebih tinggi terhadap peran laki-laki dibanding perempuan.⁹



a. Marginalisasi Kaum Perempuan

Proses marginalisasi yang mengakibatkan kemiskinan, misalnya program revolusi hijau di masyarakat Jawa dengan memperkenalkan jenis padi unggul yang tumbuh lebih rendah, dan pendekatan panen dengan menggunakan sistem tebang menggunakan sabit, tidak memungkinkan lagi dengan ani-ani, padahal alat tersebut melekat dengan kaum perempuan. Akibatnya, banyak kaum perempuan menjadi miskin dan termarginalisasi. Di sisi lain, proses panen sudah digunakannya traktor dengan melibatkan hanya beberapa orang dan juga dibutuhkan waktu yang lebih cepat.

Penerapan teknologi tersebut di kalangan petani perempuan memarginalisasi kaum perempuan dalam memainkan peran proses produksi. Dalam hal ini, kelas yang berkuasa lebih banyak diuntungkan, baik secara finansial maupun waktu.

b. Subordinasi Kaum Perempuan

Pandangan gender dapat menimbulkan subordinasi terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan dianggap irrasional, emosional, berakibat menempatkan perempuan pada posisi tidak penting. Sebagaimana anggapan orang Jawa, anak perempuan tidak perlu sekolah sampai jenjang yang tinggi, akhirnya ia akan kembali kepada urusan domestik, seperti memasak, mendidik anak, melayani suami, dan lain sebagainya.

c. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap suatu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat, contohnya pemukulan terhadap istri, jika dianggap oleh suami, bahwa istri melakukan pembangkangan. Meskipun teks agama memperbolehkan bagi suami untuk memukul dan dengan batas yang tidak melukai dan menyakitinya, hal ini sering disalahpahami terjadinya pemukulan kepada istri secara sewenang-wenang. Kebolehan menghukum pihak istri dengan melakukan pukulan meskipun dibatasi tidak boleh sampai melukai dan menyakitinya, akan melahirkan superioritas bagi laki-laki.

Dalam hal ini, tidak lepas dari latar belakang sejarah masyarakat Arab yang sangat patriarkhal. Di samping itu, terjadi perbedaan penafsiran di kalangan ahli tafsir khususnya pada corak tafsir klasik. Namun demikian, Ahmad Ali, Pavrez, dan Muhammad Asad sebagai ahli tafsir kontemporer tidak membolehkan pemukulan kepada istri sama sekali, dan hukuman jika ada, maka harus lewat atau proses pengadilan untuk kedua belah pihak (pihak istri atau suami).¹⁰ Meskipun demikian, masyarakat umumnya sudah terlanjur dan menjadi keyakinan atas pengaruh penafsiran klasik tersebut sehingga tindak kekerasan kepada kaum perempuan terus berlanjut hingga sekarang ini.

d. Double Burden bagi Perempuan

Anggapan masyarakat bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara, merawat (*being caring*),¹¹ dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga. Oleh karena itu, semua pekerjaan domestik menjadi tanggung-jawab perempuan.¹² Atas pembagian kerja ini, perempuan tidak diperhitungkan, bahkan sering disebut sebagai warga “kelas dua”.¹³ Bagi keluarga miskin, perempuan harus bekerja untuk menacari tambahan, berarti perempuan memikul beban kerja ganda.

Bias gender yang mengakibatkan beban kerja bagi perempuan sering disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat tentang jenis “pekerjaan perempuan”, seperti semua pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan kaum perempuan, dan sering dipandang pekerjaan rendah dan tidak produktif. Di sisi lain, laki-laki tidak dituntut untuk menekuni pekerjaan rumah tangga. Hal ini yang memperkuat pelanggaran secara kultural dan struktural beban kerja kaum perempuan.

Ras atau Etnisitas sebagai Sumber Ketimpangan

Etnisitas merupakan konsep kultural yang terpusat pada norma, nilai, kepercayaan, simbol kultural, dan praktik yang menandai proses pembentukan batas kultural. Kaitan dengan gagasan rasialisasi, ras merupakan konstruksi sosial dan bukan kategori universal atau esensial secara biologis ataupun dalam kebudayaan. Ras dibentuk melalui proses pergumulan



kekuasaan sosial dan politis.⁴ Ras dalam konteks ini berhubungan dengan tidak menamai dan dinamai. Dalam pandangan kolonialisme, pihak yang menamai adalah penjajah (imperialis), kulit putih karena putih segalanya.

Sebagaimana argumentasi Dyer bahwa warna putih bukanlah warna karena putih semua warna.⁵ Dalam konteks kekuasaan sosial dan politik, warna putih sebagai simbol semua warna dapat dijadikan representasi bahwa ras putih sebagai kekuatan yang mendominasi ras lainnya. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa ada yang didominasi dalam hubungan sosial dan politik.

Agama sebagai Sumber Ketimpangan

Setiap manusia dalam hidupnya pasti memiliki keyakinan kepada Tuhannya. Bentuk keyakinan ini, berkaitan erat dengan agama. Karenanya, agama menjadi bagian terpenting dari setiap hubungan antarindividu, antarkelompok, etnis, dan bahkan hubungan di dalam suatu pemeluk agama. Agama mengemban fungsi memupuk persaudaraan antarumat manusia. Pada kenyataan, hal itu sering menimbulkan konflik antarpemeluk, dan bahkan internal pemeluk agama sendiri, yang disebabkan oleh perbedaan doktrin, perbedaan suku ras pemeluk agama.

PANDANGAN TEORI KONFLIK

Teori konflik dalam beberapa literatur diidentikkan dengan teori Karl Marx.⁶ Teori konfliknya dipengaruhi oleh filsafat dialektik Hegel. Dalam perkembangan pemikiran, Marx menggantikan dialektika ideal menjadi dialektika material Fierbich sehingga sejarah merupakan proses perubahan terus-menerus secara material.⁷ Teori ini berangkat dari asumsi bahwa dalam kehidupan masyarakat terdapat kelas yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Menurut Raf Dahrendorf bahwa yang tidak dilihat oleh Marx adalah pemisahan antara pemilikan serta pengendalian sarana-sarana produksi, timbulnya korporasi-korporasi dengan saham yang dimiliki oleh orang banyak, di mana tak seorang pun yang memiliki kontrol yang eksklusif atau yang disebut dengan dekomposisi modal.⁸

Dahrendorf menggunakan teori perjuangan kelas Marxian untuk teori kelas dan pertentangan kelasnya. Bagi Dahrendorf, kelas tidak berarti pemilikan sarana-sarana produksi, tetapi juga pemilikan kekuasaan atau kontrol kekuasaan, yang mencakup hak untuk menguasai orang lain.⁹ Dengan demikian, adanya pelapisan sosial bukan dipandang sebagai konsensus karena semua anggota yang didominasi menyetujui dan membutuhkan tindakan penguasa. Oleh karena itu, anggota masyarakat harus menyepakati perbedaan tersebut yang disebabkan tidak berdaya untuk menentang atau menolaknya. Kemudian cara teori ini melihat berbagai sumber ketimpangan dalam kehidupan sosial, antara lain.

Kelas Sosial

Dalam menjelaskan konsep kelas ini, dapat dijelaskan dengan tradisi Weberian yang didasarkan pada dua hal. *Pertama*, *class as the relational explanation of economic life chance*. Oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan adalah *what explains inequalities in economically define life chances and material standards of living of individual, and families?* Ketimpangan terjadi karena berkaitan dengan hubungan masyarakat atas income yang didapatkan dari berbagai sumber daya dan aset. Dengan kata lain, *class* tersebut berkaitan dengan determinan kesempatan hidup seseorang (*life chance*) yang melahirkan berbagai tingkatan ekonomi, baik secara individual maupun keluarga.

Determinasi perbedaan tempat tinggal (*geographical location*), diskriminasi, gender, dan ras atau *genetic endowments* dapat mempengaruhi kesempatan akses dari sumber daya ekonomi dan penguasaan aset. Sebagai ilustrasi perbedaan tempat tinggal di dalam kehidupan masyarakat yang memiliki rumah/kawasan elit, maka yang terjadi adalah kesenjangan dengan penduduk lain yang rumahnya cukup sederhana atau kelompok yang tidak punya. Hal ini biasanya akan memunculkan dan melahirkan ketimpangan. Gaya hidup (*life style*) dalam penampilan antara kelas sosial yang ada di masyarakat tidaklah sama, bahkan ada yang cenderung berpenampilan eksklusif untuk membedakan dirinya dengan kelas yang lain. Namun demikian, bagi mereka yang tergolong kelas rendah (miskin) dalam berbagai hal, baik cara berpakaian, tempat tinggal, pola makan, dan bahkan gaya bicara juga sangat sederhana atau istilah lain apa adanya.



Kedua, class as dimension of historical variation in systems of inequality. Fokus masalah ini adalah rasionalisasi dimensi-dimensi yang berbeda berkaitan dengan ketimpangan tersebut.²⁰ Selanjutnya, Weber²¹ menyatakan bahwa ketimpangan terjadi karena berkaitan dengan berbagai akses sumber ekonomi (*central resources*) yang dikuasai oleh kelas yang berkuasa (*people have*) atas kelas (*people do with what they have*). Hubungannya adalah bentuk kepentingan yang melahirkan konflik kelas dalam produksi, dan bukan di pasar. Sebagai ilustrasi, hubungan antara buruh dengan pemilik perusahaan (pengusaha), di mana pengusaha posisinya sangat strategis dari pada buruh. Oleh karena itu, buruh akan selalu taat dan tidak akan berani menentangnya, meskipun gaji relatif rendah. Walaupun memperoleh upah bagi buruh adalah hak, namun mereka menyadari, bahwa kesempatan untuk bekerja tidaklah mudah. Kekhawatiran PHK jika menentang kebijakan perusahaan akan melahirkan loyalitas, bahkan kepasrahan. Sikap buruh tersebut merupakan tindakan rasional untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka.²²

Sementara itu, Marx berbeda dengan Weber. Kelas sosial bagi Marx sebagai *foundation of economic oppression and exploitation*.²³ Artinya, kelas sosial sebagai prinsip opresif secara ekonomi dan eksploitasi. Bagi Marx, struktur otoritas bersama dengan ideologi pendukungnya, mencerminkan penyebaran kekuasaan yang berbeda untuk mengontrol alat produksi seperti yang ditentukan oleh kepemilikan. Bentuk dominasi yang lebih halus dan tajam yang menandai suatu kapitalis melakukan ekspansi produksi yang sangat besar untuk meningkatkan kemakmuran kaum buruh atau menciptakan kelas menengah tidak baru yang kehilangan kontrol atas alat-alat produksi. Namun, yang jelas adalah implikasi kesejahteraan atau tingkat kemakmuran meningkatkan rasa puas yang meluas sehingga tidak disadari munculnya *status quo*.²⁴

Persoalan Jenis Kelamin

Dalam pemikiran Marxian klasik, keluarga pekerja dalam bidang industri, terdiri atas seorang perempuan yang bekerja di rumah dan melakukan reproduksi. Adapun laki-laki bekerja mendapat upah. Dalam model ini, pekerja non-upah dan pekerja upahan dimanfaatkan oleh majikan atau pemilik perusahaan untuk kepentingan keuntungan yang sebesar-besarnya.²⁵ Menurut George Simmel, perempuan selalu berhubungan dengan ketimpangan dalam proses evolusi sosial seperti pertentangan produksi bagi pasar ekonomi domestik.²⁶ Peran perempuan dalam sektor domestik ini mengakibatkan ketergantungan yang sangat tinggi dengan suami yang memiliki *income*. Pendapatan ini menjadi alat kekuasaan untuk mendominasi dan mengopresi perempuan. Oleh karena itu, dalam pandangan Mosse, patriarkal memiliki struktur kekuasaan, posisi subordinat perempuan dijunjung tinggi dan dipelihara oleh masyarakat.²⁷ Perbedaan pembagian kerja sektor publik untuk laki-laki dan domestik untuk perempuan menjadi bagian agenda sistem kapitalisme dan proses produksi dan reproduksinya.

Pembagian dunia kerja ke dalam wilayah publik dan domestik (*privat*) sebagai salah satu ideologi paling kuat yang menyokong perbedaan gender. Wilayah publik tersebut terdiri dari pranata publik, negara, pemerintahan, pendidikan, media, dunia bisnis, kegiatan perusahaan, perbankan, agama dan kultur, di hampir semua masyarakat ini didominasi oleh laki-laki.²⁸

Race dan Ethnic

Ras dan etnis dalam model teori konflik dijadikan sebagai buruh cadangan. Jika serikat buruh tidak menerima anggota kulit hitam dan minoritas lainnya, dan juga untuk memecahkan pemogokan dapat menguntungkan majikan kulit putih. Akibat status kelompok cadangan tersebut, antagonisme kulit hitam dan putih terus melangsungkan permusuhan, serta mengurangi kebersamaan identifikasi mereka dari eksploitasi majikan kulit putih. Dalam hal ini, terdapat bukti-bukti historis mengenai perlawanan laki-laki kulit putih atas masuknya golongan minoritas lain ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan berupah tinggi dalam pasar primer.²⁹ Menurut Mies, kerja kehidupan dan kerja subsistensi tambahan dalam eksploitasi pekerja formal dalam sistem kapitalis adalah pekerjaan perempuan nonupahan, yang sejajar dengan eksploitasi terhadap bangsa-bangsa pinggiran dan bangsa berwarna yang dijajah.³⁰ Masyarakat atau kelompok etnis tertentu yang mendominasi basis ekonomi akan memarginalkan kelompok etnis lainnya. Pada saat yang sama, eksploitasi terjadi dalam waktu yang panjang sebagai ilustrasi dalam konteks masyarakat Jawa yang merantau di Lampung pada suatu



saat bisa saja diperlakukan atau dianggap rendah oleh penduduk asli, ketika basis di pasar tradisional dikuasai etnis Jawa. Pemarjinalan ini semata-mata karena persaingan akses ekonomi.

Ketimpangan Gender

Ketimpangan (*inequality*) gender sebagai kondisi di mana perempuan secara universal di bawah laki-laki. Laki-laki menjadi dominan karena partisipasi mereka dalam kehidupan publik dan merendahkan perempuan ke lingkup domestik. Partisipasi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan publik tidak hanya memberikan kenaikan otoritas laki-laki atas perempuan secara universal, namun juga penilaian yang lebih tinggi terhadap peran laki-laki dibanding perempuan.³¹ Menurut Mansour Fakh³² bahwa ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai ketidakadilan, antara lain marjinalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pelabelan (*stereotype*), kekerasan, beban kerja lebih banyak (*double burden*), sosialisasi ideologi peran gender.

Berbagai ketidakadilan atau ketimpangan tersebut terjadi karena sekelompok masyarakat memiliki kepentingan dan kekuasaan yang bersumber pada gagasan dan nilai-nilai yang selalu dipergunakan sebagai senjata untuk menguasai dan melegitimasi kekuasaan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, konflik antara dua kepentingan akan melahirkan perubahan posisi dan hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Ketimpangan gender dapat dicontohkan dalam konsep keluarga yang didasarkan bahwa keluarga nuklir atas dasar pemilikan merupakan bentuk penindasan perempuan yang paling parah. Pola hubungan suami-istri dianalogkan sebagai hubungan kelas kapitalis dan proletar baik dalam fungsi ekonomi, seksual, dan pembagian properti di dalam keluarga. Keluarga ideal berlandaskan *companionship*, yang pola hubungannya horizontal bukan vertikal.³³ Konflik dalam keluarga dianggap akan membawa perubahan kemajuan dan menghancurkan kekuasaan sistem patriarkhal. Oleh karena konflik peran inilah, maka dalam perspektif teori sosial-konflik disebut sebagai bentuk keluarga yang ideal.

Perbedaan Doktrin Agama

Perbedaan doktrin dalam agama seringkali menimbulkan konflik yang disebabkan oleh keyakinan dan cara pandang yang berbeda terhadap ajaran-ajarannya. Perbedaan dalam agama tersebut dapat dikaji dengan konsep *othering*. Menurut Bauman dkk., bahwa pembahasan batas-batas antarsubjek atau kolektif, dan keserbalainan, merupakan tema sentral. Perbedaan antara keserbalainan dan perbedaan (*the distinction between difference, and otherness*) adalah perbedaan (*distinction*) lebih bersifat diskriptif, dan perbedaan (*difference*) berarti perbedaan yang bersifat strategis, sedangkan *otherness* (liyan) berarti menggambarkan distribusi kekuasaan, perbedaan antara yang dikenal (*known*) dan yang tidak dikenal (*unknown*) tidak dimediasi secara sama dan netral. Konsep *othering* selalu mengacu kepada pihak lain yang direpresi dalam relasinya, ketika yang lain (*other*) sedang dinilai (*judged*), maka pemahamannya pada cara membedakan bukan cara menghubungkan perjumpaan dengan lainnya. Gagasan *othering* ini, didasari oleh prasangka seseorang yang tergantung pada publik³⁴.

Senada dengan pendapat Susan J. Stabile, bahwa *othering* mengacu pada proses individu dan pandangan masyarakat dan orang-orang yang berlabel berbeda dengan cara mengurangi nilai mereka. Penentuannya adalah orang-orang tertentu yang “bukan kita” dan penentuan tersebut mempengaruhi upaya melihat mereka dan kebutuhan mereka. Dalam konteks ini, proses dicontohkan setiap orang mengidentifikasi diri sebagai bagian dari berbagai kelompok etnis, agama, ras, keluarga adalah proses yang menciptakan pemisahan antara mereka dalam kelompok dan di luar mereka. Seorang yang menyatakan “Saya lahir di New York City dan dibesarkannya, putih, Katolik, wanita dari warisan Italia-Amerika”, setidaknya beberapa derajat mengecualikan dari saya, bentuk siapa dan apa yang saya miliki, non-putih, non-Katolik, laki-laki, Irlandia, Polandia, non-New York, pedesaan dan sebagainya. Saya menggambarkan diri saya sendiri dengan cara yang membuat orang lain berbeda dari saya.”³⁵ Dengan demikian, sikap menganggap dan penilaian rendah kepada yang di luar diri atau kelompoknya menciptakan kecenderungan kelompok pilih dari yang di luar kelompoknya berdasar latar belakang etnis, posisi sosial ekonomi, keyakinan politik, agama, dan lain-lain, adalah salah satu penyebab utama terjadinya konflik yang berupa



kerusuhan, peperangan, kekerasan, pembunuhan. *Othering* ini prosesnya tidak terkontrol, bahkan memungkinkan tidak disadari menjadi proses sosial, pembentukan kesan, dan bahkan penghakiman.

Konflik atau bentrok antarpemeluk agama, secara fakta sosial minimal melibatkan dua golongan pemeluk agama yang berbeda keyakinannya sampai saat ini masing sering terjadi konflik, konflik tersebut sebagai proses disosiatif.³⁶ Setiap penganut akan berbeda dan memiliki kadar keyakinan interpretasi yang beragam dalam memahami dan mempelajari ajaran agamanya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Di samping itu, agama dipahami sebagai doktrin dan ajaran dan juga dipahami sebagai aktualisasi dari doktrin tersebut yang terdapat dalam sejarah.³⁷

Dalam konteks masyarakat Indonesia, konflik atau ketegangan muncul pada level masyarakat atau pemeluk akar rumput. Sebagaimana konflik SARA di Ambon yang sering terjadi akhir-akhir ini. Pada masa sebelum konflik warga muslim dan Kristen bisa hidup rukun bersama, ketegangan kedua kelompok tersebut mulai muncul ke permukaan sejak tahun 1980-an, ketika identitas keagamaan mulai menguat. Rivalitas Muslim dan Kristen tak bisa dielakkan akibat perubahan sosial tersebut. Kemudian berlanjut demarkasi simbolik tampak jelas dalam atribut yang dipakai oleh dua komunitas tersebut. Kelompok Kristen memakai ikat kepala merah, sedangkan kelompok Muslim memakai ikat kepala putih. Di wilayah Kristen dipasang gambar Yesus, salib besar, sedangkan di wilayah Muslim banyak dipasang dengan tulisan-tulisan Arab, dan mereka memakai pakaian Muslim atau Muslimah sebagai identitas mereka.³⁸ Perbedaan doktrin yang terjadi antarpemeluk agama sering menciptakan ketegangan, dan bahkan konflik horizontal berakar dari proses *othering* dalam kelompok-kelompok masyarakat dan pemeluk-pemeluk agama.

IKHTIAR PERUMUSAN STRATEGI DAKWAH

Berdasarkan kajian *social inequalities* di atas, maka perumusan strategi dakwah sebagai ikhtiar perwujudan masyarakat "*khaira ummah*". Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh para aktivis dakwah, sebagai berikut.

1. Kegiatan dakwah dilakukan secara kelompok dengan upaya *social engineering* (*amar ma'ruf* dan *nahi munkar*), khususnya dalam persoalan kelas sosial, maka harus dilakukan upaya pemberdayaan pada kelompok yang termarginalkan oleh pihak yang berkuasa. Para buruh pabrik biasanya selalu dalam posisi yang lemah dalam berbagai akses, maka upaya yang harus dilakukan oleh aktivis dakwah adalah memberikan advokasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, pihak pengusaha, dan pihak yang terkait lainnya.

2. Persoalan ketimpangan gender sebagai contoh kasus keluarga sampai saat ini pihak suami masih dominan memegang akses sumber-sumber ekonomi. Artinya, *mainstream* masyarakat, baik suami ataupun istri berkeyakinan bahwa suami sebagai pihak yang bertanggung jawab sebagai pemberi nafkah bagi keluarganya. Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan adalah penyadaran kembali atas prinsip kesetaraan gender melalui sosialisasi gender dan rekonstruksi agen-agen sosial seperti keluarga, sekolah, lembaga pemerintahan, berbagai institusi agama dan sosial yang ada.

3. Persoalan dominasi ras atau etnis. Lembaga dakwah diperlukan komposisi personalia lintas etnis dan program penyadaran atas kesamaan ideologi dalam wilayah tertentu. Di samping itu, diperlukan jaringan kerjasama lintas-etnis dalam penyelesaian berbagai konflik yang terjadi.

4. Konflik inter dan antaragama. Lembaga dakwah Islam harus memiliki *platform* kerukunan inter dan antarpemeluk agama. Dalam wilayah interpemeluk agama, diperlukan jaringan antarormas atau forum komunikasi antartokoh ormas untuk membangun berbagai kesamaan yang ada. Antarpemeluk agama dibutuhkan forum komunikasi yang lebih komprehensif untuk menekan memperkecil terjadinya konflik horizontal.

PENUTUP

Amar ma'ruf dan *nahi munkar* merupakan bentuk kegiatan dakwah dalam mengatasi ketimpangan sosial (*social inequalities*), berbagai ketimpangan tersebut dengan ditandai adanya identitas yang retak dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, analisis sosial ini dibutuhkan oleh para aktivis dakwah dalam melakukan *social reengineering*. Kerangka kerja



analisis yang digunakan dalam merumuskan strategi pengembangan dakwah dapat terukur, karena didasarkan dengan kajian yang lebih komprehensif, dengan harapan perwujudan sasaran dakwah menuju tercapainya “*khaira ummah*”.

ENDNOTES

- ¹Adi Sasono, “Dakwah Pembangunan Permasalahan dan Alternatif”, dalam Amrullah Ahmad, *Dakwah Islam dan Transformasi Sosial Budaya* (Yogyakarta: PLP2M, 1985), hal. 33.
- ²*Oxford Learner's Pocket Dictionary*, hal. 214.
- ³Bradely H, “Social Inequalities: Coming to term with Complexity”, dalam Christina Huges, *Key Concepts in Feminist Theory and Research* (London: Sage Publications, 2002), hal. 52.
- ⁴Max Weber and Emil Durkheim, dalam Ruth A. Wallace *et al.*, *Contemporary Sociological Theory: Continuing the Classical Tradition* (United State of America: Prentice Hall, 1995), hal. 262-263.
- ⁵Chris Barker, *Cultural Studies, Theory and Practice*, terjemahan Nurhadi, *Cultural Studies: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), hal. 14-15.
- ⁶Mark dan Weber dalam Erik Olin Wright, *Social Class* (Madison: Sage Publications, 2003), hal. 7.
- ⁷Moore Henrieta L. Moore, *Feminism and Anthropology and Gender* (Cambridge: Polity Pres: 1988), hal. 10.
- ⁸Julia Cleves Mose, *Gender dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 64.
- ⁹Maggie Humm, *Dictionary of Feminist Theory*, terjemahan *Ensiklopedi Feminisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 218.
- ¹⁰Asghar Ali Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society*, terjemahan Agus Nuryanto, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2007), hal. 70-74.
- ¹¹Mary Holmes, *Gender and Everyday Life: The New Sociology* (London and New York: Routledge, 2009), hal. 3.
- ¹²Mansour Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hal. 21.
- ¹³Irwan Abdullah (Ed.), *Sangkan Paran Gender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 3.
- ¹⁴Chris Barker, *Culture studies...*, hal. 27.
- ¹⁵Richard Dyer, *White* (London - New York: Routledge, 1997), hal. 47.
- ¹⁶Nasarudin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001) hal. 61.
- ¹⁷Novri Susan, *Sosiologi Konflik: Isu-isu Konflik Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenanda Group, 2009), hal. 31.
- ¹⁸Margareth M. Poloma, *Contemporary Sociology Theory*, terjemahan Tim Yosogama, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hal. 131.
- ¹⁹*Ibid.*, hal. 144.
- ²⁰Erik Olin Wright, *Social Class* (Madison: Sage Publications, 2003), hal. 3-4.
- ²¹*Ibid.*, hal. 7.
- ²²J. Dwi Narwoko dkk., *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 175.
- ²³Erik Olin, *Social Class...*, hal. 8.
- ²⁴Doyle Paul Johnson, *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspective*, Alih bahasa Robert M.Z. Lawang, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 168.
- ²⁵Jane C. Ollenburger, *Sosiologi...*, hal. 100.
- ²⁶Barbara L. Marsall *et al.*, *Engendering Social: Feminist Encounters with Sociological Theory* (England: Open University Press, 2004), hal. 123.
- ²⁷Julia Cleves Mosse, *Half the World, Half A Chance: In Introduction to Gender and Development*, terjemahan Hartian Silawati, *Gender Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 64.
- ²⁸*Ibid.*, hal. 106.
- ²⁹*Ibid.*, hal.109.
- ³⁰*Ibid.*
- ³¹Maggie Humm, *Dictionary of Feminist Theory...*, hal. 218.
- ³²Mansour Fakh, *Analisis Gender...*, hal. 12-22.
- ³³Randall Collins, “Sociology of Marriage and the Family: Gender, Love and Property”, dalam Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* (Bandung: Mizan, 1999), hal. 85.
- ³⁴Karin Creutz, *The Othering of Islam in European Context: Polarizing Discourses in Swedish language Dailies in Finland*, 2008, hal. 7.
- ³⁵Susan J.Stabile, *Using Religion to Promote Corporate Responsibility*, 39. Wake Forest L. Rev, 2004, hal. 4-5.
- ³⁶Hendropuspito, *sosiologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal. 151.



- ³⁷ Afif Muhammad, "Kerukunan Beragama pada Era Globalisasi", dalam Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Rosda, 2000), hal. 149.
- ³⁸ Akiko Horiba, "Diskusi tentang konflik Ambon", dalam *The Intersection Foundation*, 15 Mei 2007.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan (Ed.). 2006. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barker, Chris. 2009. *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Bradely H. 2002. "Sosial Inequalities: Coming to Term with Complexity", dalam Christina Huges, *Key Concepts in Feminist Theory and Research*. London: Sage Publications.
- Collins, Randall. 1999. *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan.
- Creutz, Karin. 2008. *The Othering of Islam in European Context: Polarizing Discourses in Swedish language Dailies in Finland*. TP: TTP.
- Dyer, Richard. 1997. *White*. London, New York: Routledge.
- Engineer, Asghar Ali. 2007. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKIS.
- Erik din Wright. 2003. *Social Class*. Madison: Sage Publications.
- Fakih, Mansour. 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hendropuspito. 1990. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Holmes, Mary. 2009. *Gender and Everyday Life: The New Sociology*. London and New York: Routledge.
- Horiba, Akiko. 2007. "Diskusi tentang Konflik Ambon" dalam *The Intersection Foundation*.
- Humm, Maggie. 2007. *Ensiklopedi Feminisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Johnson, Doyle Paul. 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moore, Henrieta L. 1988. *Feminism and Anthropology and Gender*. Cambridge: Polity Press.
- Mose, Julia Cleves. 1996. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad, Afif. 2000. "Kerukunan Beragama pada Era Globalisasi" dalam Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*. Bandung: Rosda.
- Narwoko J. Dwi dkk. 2004. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media.
- Poloma, Margareth M. 2007. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik: Isu-isu Koflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenanda Group.
- Marsall, Barbara L. 2004. *Engendering Social: Feminist Encounters with Sociological Theory*. England: Open University Press.
- Stabile, Susan J. 2004. *Using Religion to Promote Corporate Responsibility*. Wake Forest L. Rev.
- Umar, Nasarudin. 2001. *Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Sasono, 1985. "Dakwah Pembangunan Permasalahan dan Alternatif" dalam Amrullah Ahmad, *Dakwah Islam dan Transformasi Sosial Budaya*. Yogyakarta: PLP2M.
- Wallace, Ruth A. 1995. *Contemporary Sociological Theory: Continuing the Classical Tradition*. United State of America: Prentice Hall.
- Wright, Erik Olin. 2003. *Social Class*. Madison: Sage Publications.